



## ANALISIS PENENTUAN SUKU BUNGA KREDIT PROGRAM SEKTOR PERTANIAN DAN POTENSI PENGARUHNYA TERHADAP APBN<sup>1</sup>

### ANALYSIS ON THE DETERMINATION OF INTEREST RATE SUBSIDY FOR AGRICULTURAL CREDIT PROGRAM AND ITS POTENTIAL IMPACTS ON GOVERNMENT BUDGET

Sidiq Suryo Nugroho, Eko Wicaksono, dan Abdul Aziz

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan  
GD.R. M. Notohamiprodjo, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat – 10117  
Email: sidiqsugroho@yahoo.com

Naskah diterima: 25 Mei 2015, revisi pertama: 9 September 2015, revisi kedua: 16 Februari 2016, revisi ketiga: 16 Agustus 2016.

#### *Abstract*

*This study is aimed to investigate the determination of interest rate subsidy provided by the government to help farmers and improve agricultural productivity. One parameter used to determine the interest rate of credit program is the Deposit Insurance Agency (LPS) interest rate. The basis for determining the interest rate credit program is one of the main issues discussed in this study. In addition, other matter discussed in this study is the proportion of interest expense borne each by the debtor and the government. The study is conducted by using mix methods analysis using primary data derived from the survey and secondary data related lending rates. Based on the analysis conducted, there are several conclusions that can be drawn. First, interest rates LPS is appropriate as the basis for determining the interest rate of credit interest rate guarantee program since LPS rate constitutes the largest portion of cost of fund. Second, in the long term the government needs to evaluate patterns of current credit program so that it can both increase the self-reliance of farmers and improve the efficiency and efectivity of government subsidy. Third, for the time being the government can implement a fixed interest rate subsidy to credit the program with regard to the ability of farmers to minimize the fiscal risks exposure in the government budget.*

**Keywords:** *Agriculture, credit program, subsidy, fiscal risk, fixed interest rate.*

<sup>1</sup>Artikel ini merupakan pengembangan dari Laporan Akhir Kajian Tentang Penentuan Subsidi Bunga Tahun 2014 Pada Pusat Kebijakan-APBN, Badan Kebijakan Fiskal yang tidak dipublikasikan, ditulis oleh Saudara Abdul Aziz, Saudara Sidiq Suryo Nugroho, dan Saudara Eko Wicaksono. Artikel ini juga merupakan pengembangan dari laporan pembinaan kader peneliti yang telah disampaikan oleh Saudara Abdul Aziz pada tahun 2015.



## Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penetapan subsidi bunga kredit program yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu petani dan meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu parameter dalam penentuan tingkat suku bunga kredit program adalah tingkat suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dasar penentuan suku bunga kredit program merupakan salah satu permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Selain itu, hal lainnya yang dibahas dalam kajian ini adalah proporsi beban bunga yang ditanggung oleh debitur dan pemerintah. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode campuran dengan menggunakan data primer yang berasal dari survei serta data sekunder terkait suku bunga kredit. Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, suku bunga penjaminan LPS layak untuk dijadikan dasar penentuan tingkat suku bunga kredit program karena suku bunga penjaminan LPS merupakan salah satu komponen terbesar biaya dana dari perbankan saat ini. Kedua, dalam jangka panjang pemerintah perlu untuk mengevaluasi pola pemberian kredit program saat ini sehingga di satu sisi dapat meningkatkan kemandirian petani dan di sisi lain dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja subsidi pemerintah. Ketiga, untuk saat ini pemerintah dapat menerapkan subsidi bunga tetap untuk kredit program dengan tetap memperhatikan kemampuan petani sehingga dapat meminimalkan risiko fiskal dalam APBN.

**Kata Kunci:** Pertanian, kredit program, subsidi, risiko fiskal, suku bunga tetap.

## A. PENDAHULUAN

Salah satu sektor perekonomian Indonesia yang masih mempunyai posisi strategis adalah sektor pertanian. Kondisi ini terlihat dari proporsi kontribusi output PDB sektor ini tahun 2012 yang mencapai 14,44% atau sekitar Rp1.190 triliun dari total PDB sekitar Rp8.241 triliun (Aziz, 2013).

Meskipun sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis, namun dalam kenyataannya banyak faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan produksi dan produktivitas sektor ini seperti: masalah banyaknya konversi lahan, infrastruktur irigasi yang masih belum optimal, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, masalah permodalan dan pembiayaan kredit, dan lainnya.

Diantara masalah-masalah tersebut, faktor pembiayaan menjadi sangat *urgent* untuk segera dipecahkan. Hal ini disebabkan faktor pembiayaan (dibaca: modal) bagi pelaku usaha sektor ini berfungsi sebagai salah satu faktor produksi dan berperan dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha (petani) dalam menjalankan usahanya sehingga hasil produksinya akan optimal.

Dalam rangka mendukung pembiayaan bagi petani, pemerintah Indonesia sebenarnya telah menjalankan beberapa model kredit program yang secara garis besar terbagi dalam dua model skema pembiayaan kredit, yaitu skema Subsidi Bunga dan Penjaminan Risiko sebagaimana tampak pada tabel 1 di bawah ini:



Tabel 1.  
 Skema Kredit Program Sektor Pertanian

Skema Kredit Program	
Subsidi Bunga	Penjaminan Risiko
<ul style="list-style-type: none"> <li>- KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi)</li> <li>- KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revalidasi perkebunan)</li> <li>- KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi)</li> <li>- Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias (KPP NAD-Nias) Korban Bencana Alam Gempa dan Tsunami</li> <li>- Subsidi Resi Gudang (SRG)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kredit Usaha Rakyat (KUR)</li> </ul>

Sumber: Aziz (2013), data diolah.

Berbicara tentang pembiayaan kredit kepada petani, maka tidak lepas dari pembicaraan tentang besaran suku bunga dan bagaimana mekanisme penetapan suku bunga kredit program tersebut. Pada artikel ini, penulis hanya fokus pada pembahasan besaran suku bunga pada skema kredit program pemberian Subsidi Bunga. Hal ini dikarenakan pada skema ini besaran suku bunga berubah secara periodik dan memerlukan pembahasan yang berulang-ulang pada setiap periodenya antara Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga, Bank Pelaksana, dan instansi terkait lainnya. Kondisi ini bertolak belakang dengan suku bunga yang ditetapkan pada kredit program dengan skema penjaminan risiko yaitu pada program KUR yang cenderung stabil dari awal program hingga sekarang.

Penetapan suku bunga kredit program untuk skema pemberian subsidi bunga, khususnya untuk skema KKP-E dan KUPS, didasarkan pada besarnya suku bunga penjaminan simpanan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai acuan. Suku bunga kredit yang digunakan dalam KKP-E adalah tingkat suku bunga pasar untuk kredit sejenis dengan ketentuan bahwa suku bunga tertinggi adalah tingkat suku bunga penjaminan LPS ditambah 5% untuk usaha pengembangan tebu, sedangkan untuk usaha non-tebu adalah tingkat bunga LPS ditambah 6%.

Pada kredit melalui skema KUPS, tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat bunga untuk kredit sejenis dengan ketentuan bahwa tingkat bunga tertinggi adalah tingkat bunga penjaminan oleh LPS ditambah 6%. Adapun tingkat bunga yang ditanggung oleh debitur dalam skema KUPS disebutkan secara eksplisit sebesar 5%. Selisih antara tingkat bunga KUPS dengan tingkat bunga yang ditanggung oleh debitur adalah subsidi bunga yang ditanggung oleh pemerintah.

Namun demikian, penentuan suku bunga kredit program berdasarkan suku bunga **LPS plus** ini masih mengundang pro-kontra di kalangan praktisi tentang masih relevankah formula ini?, dan adakah formula lainnya yang lebih baik?, serta pro-kontra lainnya.

### Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimanakah sebaiknya mekanisme penentuan suku bunga kredit pada kredit program skema subsidi bunga ini (KKP-E, KUPS dan KPEN-RP) dan bagaimanakah potensi dampaknya pada pos belanja di APBN?.



## Tujuan Penulisan Artikel

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah:

- (1) Menganalisis mekanisme penentuan besaran suku bunga kredit program, dan
- (2) Menghitung potensi dampaknya terhadap belanja pada APBN jika mekanisme suku bunga tersebut diimplementasikan.

## B. METODE PENELITIAN

Metode analisis pada artikel ini menggunakan pendekatan metode campuran atau *mix methods*, yaitu metode kualitatif deskriptif dan kuantitatif sederhana. Pada analisis metode kualitatif deskriptif, data berasal dari studi kepustakaan, survei, dan hasil wawancara (*in depth interview*), sedangkan data yang digunakan dalam analisis kualitatif berasal dari pengumpulan data sekunder dan hasil survei serta wawancara. Sebagai data pendukung analisis, dikumpulkan data sekunder yang relevan dengan kajian dari beberapa instansi terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep, peraturan hukum, dan teori yang melandasi praktek pemberian subsidi bunga. Sedangkan studi kepustakaan yang dilakukan adalah untuk menganalisis praktek pelaksanaan subsidi bunga kredit program yang telah dilakukan pemerintah selama ini serta *best practice* terkait praktek pemberian subsidi bunga kredit program yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia.

Disamping analisis kualitatif deskriptif, dilakukan juga analisis menggunakan analisis kuantitatif sederhana untuk menghitung dampak dari pemberian subsidi bunga terhadap belanja subsidi pada postur APBN.

Survei dan wawancara secara mendalam dilakukan kepada responden yang terdiri dari 27 debitur yang telah dan sedang menjadi debitur kredit program KKP-E dan enam Bank BRI di enam kabupaten penghasil tanaman pangan dan ternak sebagai daerah sampel penelitian. Wawancara dilakukan kepada para pihak yang berhubungan langsung dengan subjek yang sedang diteliti, yaitu para debitur dan bank pelaksana kredit program, dalam hal ini petani nasabah Bank BRI dan Bank BRI pelaksana kredit program KKP-E. wawancara dilakukan dengan tatap muka satu per satu dengan responden survei.

Penentuan lokasi sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* pada daerah-daerah yang merupakan sentra tanaman pangan dan ternak berdasarkan data dari Kementerian Pertanian. Wilayah pengambilan sampel meliputi Kabupaten Cianjur, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan berdasarkan pada volume panen beberapa komoditas terpilih yaitu padi, kedelai, dan sapi

Sedangkan untuk pemilihan responden survei juga ditentukan secara *purposive sampling* berdasarkan informasi dari pihak bank, yaitu debitur yang sedang menjalani masa kredit program, minimal yang telah menjadi kreditur untuk jangka waktu kredit yang kedua.

Pelaksanaan survei dilakukan pada rentang waktu bulan Maret–Juli 2014, yang dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada debitur yang menjadi responden survei. Kuesioner diberikan kepada debitur yang terdiri dari kelompok tani dan para petani. Kelompok tani yang dipilih adalah petani pelaku usaha tani bahan pokok, sapi, dan petani lain.

Selain itu juga diberikan kuesioner kepada bank penyalur kredit program yang berada di



daerah sentra produksi pertanian di Indonesia sebagai wilayah pengambilan sampel, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Survei dan wawancara kepada bank penyalur kredit program dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai bantuan kredit program yang telah disalurkan kepada para petani, penetapan besaran suku bunga beban petani, dan hambatan bagi petani dan bank penyalur dalam mengakses kredit program sektor pertanian.

## C. KERANGKA TEORI

### Komponen Suku Bunga Kredit Program

Di Indonesia kredit program dilakukan melalui beberapa skema antara lain Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), dan Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias (KPP NAD Nias). Beberapa macam program subsidi bunga kredit tersebut ditetapkan dengan berbagai tingkat suku bunga yang berbeda-beda.

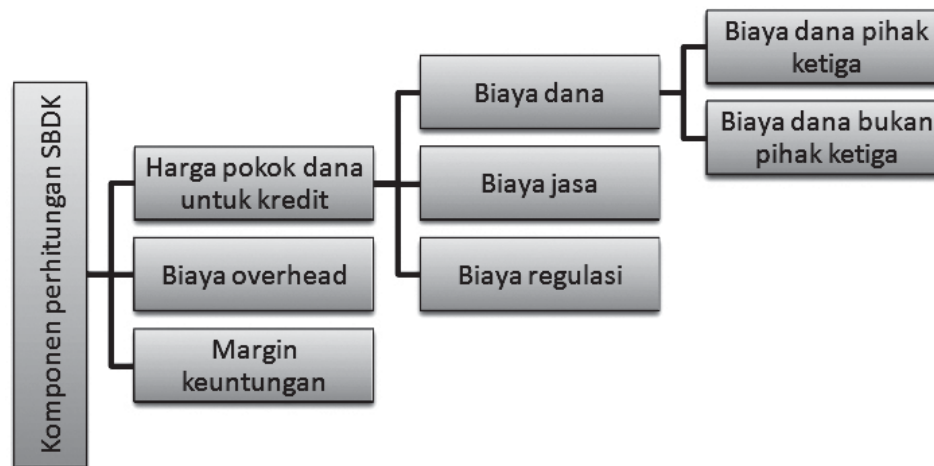
Penetapan suku bunga kredit program, khususnya untuk skema KKP-E dan KUPS, didasarkan pada besarnya suku bunga penjaminan simpanan di LPS sebagai acuan. Menurut PMK-79/2007 sebagaimana diubah melalui PMK-48/2009 dan PMK-198/2010, suku bunga kredit yang digunakan dalam KKP-E adalah tingkat suku bunga pasar untuk kredit sejenis dengan ketentuan bahwa suku bunga tertinggi adalah tingkat suku bunga penjaminan LPS ditambah 5% untuk usaha pengembangan tebu, sedangkan untuk usaha non-tebu adalah tingkat bunga LPS ditambah 6%.

Pada kredit melalui skema KUPS, tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat bunga untuk kredit sejenis dengan ketentuan bahwa tingkat bunga tertinggi adalah tingkat bunga penjaminan oleh LPS ditambah 6% sebagaimana disebutkan dalam PMK-131/2009. Adapun tingkat bunga yang ditanggung oleh debitur dalam skema KUPS disebutkan secara eksplisit sebesar 5%. Selisih antara tingkat bunga KUPS dengan tingkat bunga yang ditanggung oleh debitur adalah subsidi bunga yang ditanggung oleh pemerintah.

Tingkat suku bunga penjaminan LPS digunakan sebagai acuan tingkat bunga tertinggi yang dapat diberikan oleh bank umum/BPR terhadap simpanan yang dijamin. Dengan kata lain, apabila bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah lebih dari yang ditetapkan oleh LPS, maka simpanan tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam program penjaminan LPS. LPS *rate* dapat menjadi dasar bagi bank untuk menetapkan tingkat suku bunga bagi dana yang berhasil ditarik dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan.

Bank Indonesia sejak tahun 2011 telah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan bank untuk menyampaikan perhitungan suku bunga dasar kredit (SBDK) dimana di dalam laporan tersebut, bank wajib untuk memberikan rincian terkait segala macam biaya yang harus dikeluarkan dalam pemberian kredit kepada masyarakat. Biaya dana dari pihak ketiga (dana yang berasal dari simpanan/tabungan) hanyalah salah satu komponen dari biaya dana dalam penentuan harga pokok dana untuk kredit. Komponen lain dari biaya dana selain biaya dana pihak ketiga adalah seperti biaya dana dari bank lain, biaya dana dari Bank Indonesia, biaya dana surat berharga dan lainnya. Pembentukan harga pokok dana untuk kredit juga memperhatikan biaya lainnya selain biaya dana, seperti biaya jasa dan biaya regulasi. Selanjutnya untuk membentuk suku bunga dasar kredit perlu ditambahkan lagi dengan biaya *overhead* dan *margin* keuntungan.





Sumber: Bank Indonesia(2014), diolah

Gambar 1.  
Komponen Perhitungan SBDK

### Praktek Pemberian Subsidi Bunga di Beberapa Negara di Dunia

Beberapa literatur studi terdahulu telah membahas mengenai pembiayaan kredit melalui kredit program dan penerapannya dalam rangka mengatasi masalah permodalan bagi usaha kecil/mikro dan menengah yang sasaran jangka panjangnya yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan. Morduch (2000), menyatakan bahwa diketahui banyak rumah tangga miskin jika diberikan kredit mampu untuk membuka usaha kecil yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi dan mengembangkan usahanya sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan memperbaiki tingkat kehidupan mereka. Oleh karena itu pemerintah memberikan subsidi bunga kredit kepada rumah tangga miskin yang melakukan usaha kecil/mikro dan menengah untuk mengatasi keengganan pihak bank dalam menyalurkankredit kepada usaha kecil/mikro dan menengah tersebut.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan pembiayaan terhadap masyarakat miskin di desa, Meyer (2011), dalam studinya menyatakan bahwa subsidi dan dana bantuan merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan pada masyarakat desa melalui pembiayaan mikro usaha pertanian di pedesaan. Pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi melalui usaha pertanian pada masyarakat perdesaan menghadapi tantangan terbesar berupa hambatan mengenai pembiayaan untuk melakukan usaha pertanian. Oleh karena itu campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan sekaligus untuk memperkuat sistem finansial yang mendukung masyarakat desa.

Banyak negara di dunia juga melakukan program pengentasan kemiskinan melalui pemberian pembiayaan kredit lunak terhadap usaha kecil/mikro dan menengah melalui kebijakanprogram dengan memberikan bantuan subsidi bunga kredit terutama untuk usaha di bidang pertanian. Praktek pemberian subsidi bunga kepada usaha kecil/mikro dan menengah, terutama pada sektor pertanian,di beberapa negara di dunia diantaranya yaitu:

#### a. Nigeria

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Nigeria sebagai penyumbang utama PDB bagi Nigeria dengan peranan dominan dari petani skala kecilnya.Namun, perkembangan



dari petani skala kecil di Nigeria, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, terkendala karena keterbatasan akses terhadap fasilitas kredit yang ada. Kendala keterbatasan akses terhadap fasilitas kredit disebabkan jumlah kantor cabang institusi pembiayaan formal yang berada di daerah pedesaan tidak cukup tersedia. Selain itu keterbatasan kredit juga disebabkan karena tidak adanya penyediaan jaminan sebagai agunan kredit oleh petani skala kecil, resiko usaha pertanian yang tinggi, dan tingginya ketidakpastian usaha di bidang pertanian (Badiru, 2010).

Pemerintah Nigeria melalui Bank Sentral Nigeria (*Central Bank of Nigeria*) telah menjalankan beberapa kebijakan program pembiayaan yang ditujukan untuk mendorong perkembangan sektor pertanian di Nigeria, salah satunya adalah program Skema Dukungan Kredit Pertanian (*Agricultural Credit Support Scheme*) yang dimulai dari tahun 2006. ACSS ditujukan bagi petanidan bidang usahasektor pertanian lainnya seperti usaha ternak, penangkapan ikan, peralatan perkebunan, dan penyediaan jasa pertanian, agar dapat mengembangkan sektor pertanian dengan dukungan pembiayaan dengan bunga rendah. Tingkat suku bunga kredit pertanian ACSS ditetapkan sebesar 14%. Beban bunga yang harus ditanggung oleh petani sebagai debitur adalah 8%, sisanya 6% merupakan subsidi bunga yang ditanggung oleh pemerintah Nigeria(Christopher at al., 2010).

#### **b. India**

Dalam kebijakan di sektor pertanian, pemerintah India mengeluarkan sejumlah kebijakan diantaranya kebijakan subsidi input dan dukungan harga pasar bagi produk pertaniannya yang merupakan pilar utama dari program dukungan domestik bagi petani oleh pemerintah India. Subsidi input yang diberikan pemerintah India kepada sektor pertaniannya antara lain subsidi listrik untuk keperluan pertanian, subsidi pupuk, subsidi irigasi, subsidi bunga kredit, dan skema subsidi lainnya (Hoda dan Gulati, 2013).

Menurut Departemen Pertanian dan Koperasi India, pemerintah India telah mengambil beberapa inisiatif kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas petani kecil terhadap institusi pembiayaan dan kredit. Dimulai pada tahun 2004, pemerintah India mengumumkan paket kredit peternakan pada bulan Juni 2004. Jumlah pembiayaan terhadap petani meningkat sejak tahun tersebut. Kebijakan kredit pertanian dilanjutkan dengan paket subsidi bunga pada tahun 2006, dengan tujuan penyediaan pembiayaan jangka pendek untuk tanaman pangan, pinjaman dengan jumlah plafon kredit sampai dengan Rs.300.000 diberikan bunga dengantingkat suku bunga pinjaman sebesar 7%. Pemerintah India memberikan subsidi bunga sebesar 2% pada tahun 2009 dan bagi petani yang mengembalikan pinjaman sebelum jatuh tempo diberikan tambahan subsidi sebesar 1%.Tambahan subsidi bunga dinaikkan menjadi sebesar 2% pada tahun 2010 dan 3% pada tahun 2012 serta 2013.

Pemberian subsidi bunga kredit dilakukan dengan menetapkan batas atas suku bunga yang diperbolehkan untuk dikenakan kepada petani oleh bank yang ditunjuk untuk menyalurkan kredit program, yaitu 7%. Subsidi bunga yang ditetapkan pemerintah India adalah sebesar 2% pertahun di tahun 2014, apabila petani membayar tepat waktu, maka akan diberikan tambahan subsidi bungamenjadi sebesar 3%.Oleh karena itu petani hanya menerima beban bunga maksimal 4%(7 dikurangi 3) pertahun (Reserve Bank of India, 2013).

#### **c. Brazil**

Brazil sebagai salah satu negara penghasil produk pangan terbesar di dunia menggunakan



subsidi bunga kredit program sebagai salah satu kebijakan guna mendorong peningkatan produksi pertaniannya. Cardoso et al. (2011), menyebutkan bahwa pemerintah Brazil memberikan petani subsidi bunga sebesar 4% pertahun, sedangkan tingkat bunga pinjaman ditetapkan sebesar 12% pertahun, sehingga petani masih menanggung beban bunga pinjaman sebesar 8%. Sebelumnya pada tahun 2008 pemerintah Brazil memberikan subsidi bunga kredit program pertanian sebesar 3% saat tingkat bunga pinjaman khusus untuk sektor pertanian berada pada tingkat bunga 6,75% (Harris, 2009).

#### **d. Negara-Negara Eropa**

Praktek pemberian subsidi bunga di negara-negara Eropajuga dilakukan oleh masing-masing pemerintah negara seperti Finlandia, Yunani, Jerman, Polandia, Perancis, dan Belgia (Jansson et al., 2013). Dalam studi yang dilakukannya, Jansson tidak menyebutkan secara pasti tingkat subsidi bunga kredit pertanian yang diberikan oleh masing-masing negara tersebut, namun pemberian subsidi bunga kredit pertanian pada negara-negara tersebut diukur berdasarkan tingkat kepentingannya. Pemerintah Finlandia menganggap penting pemberian subsidi bunga kredit pertanian sebesar 40%, Yunani menganggap penting pemberian subsidi sebesar 30%, Jerman 50%, dan Belgia menganggap penting pemberian subsidi bunga bagi petani sebesar 57%. Negara Eropa yang paling menganggap pentingnya subsidi bunga kredit pertanian adalah Polandia yaitu sebesar 100%.

#### **e. Filipina**

Berbeda dengan beberapa negara yang lain, pemerintah Filipina saat ini sudah tidak lagi memberikan bantuan subsidi bunga kredit program pada sektor pertaniannya. Menurut Geron dan Casuga (2012), subsidi bunga kredit program pertanian di Filipina telah dihapuskan oleh pemerintah Filipina sejak tahun 1999. Sejarah mengenai subsidi bunga kredit program pertanian di Filipina dimulai pada periode waktu 1970-1980. Pada periode tersebut pemerintah Filipina memberikan subsidi bunga kredit program pertanian kepada petani komoditas pertanian tertentu dengan tingkat suku bunga sebesar 3% pertahun untuk petani yang mempunyai deposit pada bank pedesaan, sedangkan pemberian subsidi bunga dengan tingkat bunga 1% pertahun menggunakan skema pemberian subsidi bunga langsung dari bank sentral. Selanjutnya pada periode 1981-1990, sejak dilakukannya deregulasi tingkat suku bunga, subsidi bunga yang melalui skema diskon dari bank sentral dihapus. Setelah tahun 1999, pemerintah Filipina menghapus seluruh program subsidi bunga dan mengganti pembiayaan sektor pertaniannya dengan tingkat suku bunga pasar.

Rangkuman penerapan subsidi bunga kredit yang dilakukan pada beberapa negara di dunia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.





Tabel 2. *Best Practices* Penerapan Subsidi Bunga Kredit Program Sektor Pertaniandi Negara Lain

No.	Negara	Besaran Tingkat Suku Bunga			Keterangan
		Pinjaman	Subsidi	Beban Petani	
1	Nigeria	14%	6%	8%	Bagi petani dan usaha sektor pertanian lainnya (peternakan, penangkapan ikan, peralatan perkebunan, jasa pertanian).
2	India	7%	2%	5%	Diberikan kepada petani dengan plafon kredit maksimal Rs. 300.000,
		7%	3%	4%	Tambahan bagi petani dengan plafon kredit Rs. 300.000 yang mengembalikan pinjaman tepat waktu.
3	Brazil	12%	4%	8%	Subsidi bertujuan agar terjadi peningkatan permintaan terhadap produk pertanian sehingga mendorong produksi.
4	Negara-negara Eropa		-		Subsidi bunga kredit program pertanian diberikan oleh negara: Finlandia, Yunani, Jerman, Polandia, Perancis, dan Belgia namun besaran subsidi bunganya berbeda-beda.
5	Filipina		-		Sejak tahun 1999 pemerintah Filipina telah menghapus subsidi bunga, dan menggunakan bunga pasar sebagai dasar suku bunga kredit pertaniannya.

Sumber: Berbagai sumber (2014), diolah

### Pro dan Kontra Pemberian Subsidi Bunga pada sektor Pertanian

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB Indonesia, menurut data BPS-2014, pada tahun 2010 kontribusi sektor pertanian terhadap total PDB Indonesia adalah sebesar 15,3%, terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan. Namun kontribusi tersebut belum mensejahterakan pelaku sektor pertanian, yaitu petani, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan. Pada tahun 2011 penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani adalah 44% dari total angkatan kerja di Indonesia (Agroindonesia, 2011). Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010 menurut data BPS-2014 berjumlah 31,02 juta jiwa atau 13,33% dari total penduduk Indonesia. Sebanyak 16, 56% dari jumlah penduduk miskin tersebut tinggal di daerah pedesaan.

Badiru (2010), dalam penelitiannya tentang *review* terhadap akses petani pada program kredit pertanian di Nigeria menyatakan bahwa terdapat banyak manfaat yang diterima oleh petani penerima kredit program pertanian berupa peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan petani, perbaikan akses terhadap fasilitas transaksi ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan proteksi terhadap kerentanan ekonomi. Berdasarkan penelitian Cristhopher et al. (2010), disebutkan bahwa Nigeria berhasil menjadi eksportir produk pertanian dan mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya melalui program kebijakan pembiayaan pedesaan. Selain itu, pendapatan petani meningkat dan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja terjadi sebagai akibat pelaksanaan kebijakan pembiayaan di sektor pertanian.



Menurut Cardoso et al. (2011), penelitian mereka mengenai efek dari pemberian subsidikredit pedesaan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Brazil menunjukkan bahwa subsidi pemerintah akan dapat meningkatkan produksi petani, sehingga dapat menekan inflasi pada produk pertanian terutama produk pangan. Pemberian subsidi tersebut menciptakan beban biaya bagi pemerintah, namun keuntungan yang didapatkan dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi ternyata melebihi dari beban biaya yang muncul dari pemberian subsidi.

Namun, terdapat kritikan terhadap pemberian bantuan subsidi bunga kredit program yang menunjukkan bahwa pemberian subsidi bunga akan menciptakan *subsidy trap* yang akan membebani anggaran negara dan membuat usaha kecil dan menengah menjadi tidak kompetitif. Permasalahan yang timbul pada kredit program adalah terdapat informasi yang tidak seimbang antara debitur dan kreditur, masalah *moral hazard* dan *adverse selection*, masalah agunan kredit, dan besaran alokasi kredit. Beberapa permasalahan dihadapi oleh perbankan dalam menyalurkan kredit pada sektor usaha mikro, yang sebagian besar merupakan rumah tangga miskin, telah membuat pihak bank enggan dalam menyalurkan kreditnya sehingga membuat pemerintah harus memberikan subsidi bagi rumah tangga miskin tersebut.

Swinnen dan Gow (1997) dalam penelitiannya mengenai kebijakan dan permasalahan pada kredit pertanian di negara eropa timur dan eropa tengah, menyatakan bahwa pemberian subsidi bunga bagi petani akan membuat kredit lebih murah, namun terdapat beberapa kerugian pada program tersebut yaitu: subsidi akan membebani pemerintah, subsidi yang diterapkan akan cenderung bersifat permanen dan sulit untuk dihapuskan, dana subsidi tidak dapat dialokasikan kepada investasi infrastruktur yang lebih menguntungkan masyarakat, subsidi dapat mematikan industri pembiayaan. Sebagian besar kredit program tidak mengatasi masalah utama yaitu berkaitan dengan inflasi, masalah agunan, rendahnya tingkat keuntungan pada sektor pertanian, dan biaya yang tinggi pada transaksi, karena hanya mengatasi gejala yang timbul dari permasalahan pembiayaan pertanian.

Menurut Morduch (2000), bank akan menghadapi permasalahan pada saat menyalurkan kredit skala kecil yaitu: (1) biaya transaksi yang tinggi untuk tiap transaksi kredit yang disalurkan, (2) kesulitan dalam penentuan resiko bagi calon peminjam serta pengawasan terhadap pengembalian pinjaman sulit dilakukan jika calon peminjam merupakan masyarakat miskin dan mempunyai usaha dalam bidang usaha informal, dan (3) tidak adanya agunan yang dimiliki oleh rumah tangga miskin sebagai jaminan kepada bank saat pengajuan kredit.

Wiggins dan Brooks (2010) dan Meyer (2011), juga menyatakan efek negatif dari subsidi kredit pertanian oleh pemerintah seperti juga Swinnen dan Gow (1997), serta Morduch (2000), yaitu subsidi akan cenderung menguntungkan sebagian dari petani saja atau sebagian dari komoditas yang diberikan subsidi saja, dan akan terjadi kecenderungan penggunaan yang berlebihan pada input yang diberikan subsidi.

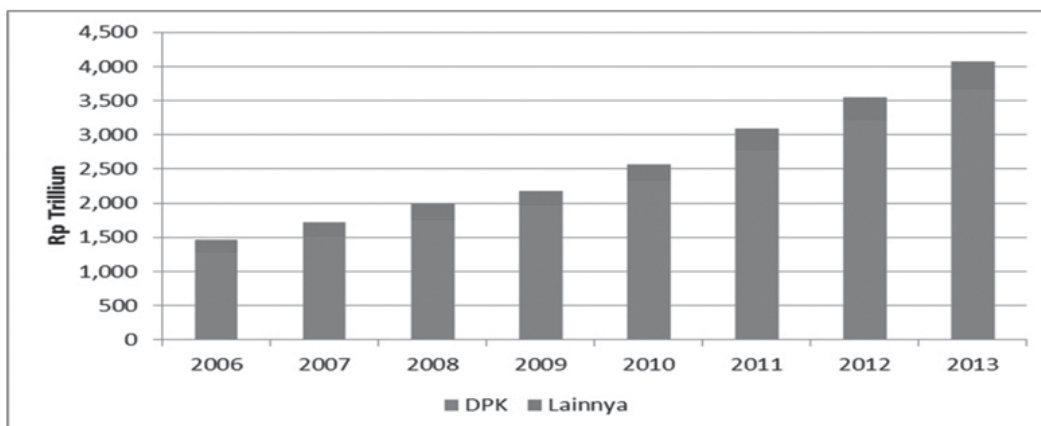
## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Penentuan Suku Bunga Kredit Program**

Suku bunga LPS dapat menjadi dasar untuk menetapkan tingkat suku bunga bank bagi dana yang berhasil ditarik dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan. Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia yang dirilis oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, pada gambar 2, dana pihak ketiga menduduki porsi terbesar sumber dana yang dimiliki oleh bank apabila dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Lebih dari 90% sumber dana bank berasal dari dana pihak ketiga, yaitu berupa simpanan atau tabungan yang dihimpun dari



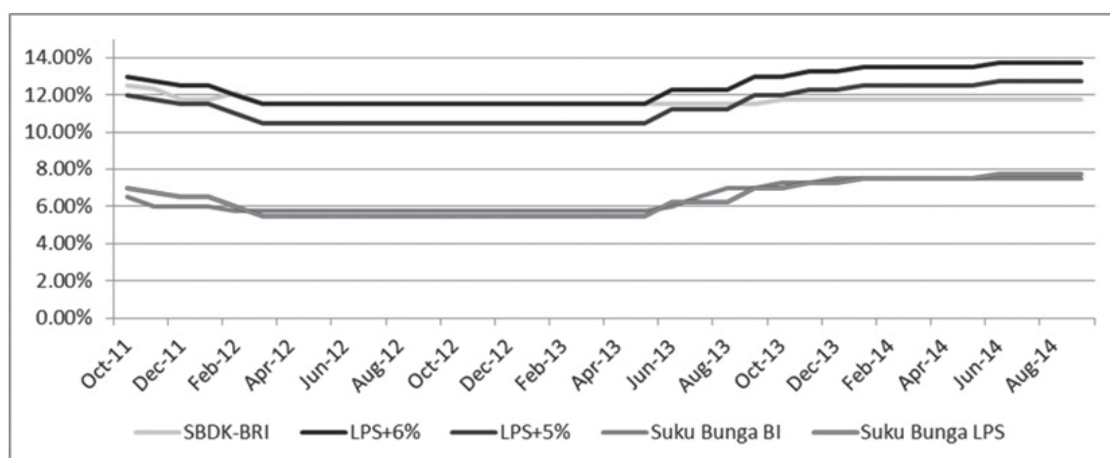
masyarakat. Mengingat besarnya porsi dana pihak ketiga dalam sumber dana perbankan, maka wajar apabila tingkat suku bunga penjaminan LPS dijadikan sebagai dasar penentuan suku bunga kredit program.



Sumber: Bank Indonesia (2014), diolah

Gambar 2.  
Sumber Dana Bank

Terkait dengan penentuan tingkat suku bunga untuk kredit pada Bank BRI, hubungan antara SBDK Bank BRI untuk kredit ritel, tingkat suku bunga LPS, BI rate dan tingkat suku bunga maksimum untuk KKP-E dan KUPS ditunjukkan pada Gambar 3. Dari gambar tersebut terlihat bahwa untuk beberapa periode, tingkat suku bunga KKP-E & KUPS (LPS+6%) sudah mendekati tingkat SBDK BRI. Untuk beberapa periode, tingkat suku bunga KKP-E & KUPS sama dengan SBDK BRI, sementara untuk beberapa periode tingkat suku bunga KKP-E & KUPS berada di atas SBDK BRI. Sedangkan Bunga KKP-E tebu, untuk beberapa periode masih berada di bawah SBDK BRI. Berdasarkan data tersebut, bunga KKP-E saat ini (LPS+6%) cukup dekat dengan tingkat bunga SBDK BRI untuk kredit ritel, sehingga dapat memberi insentif bagi bank untuk menyalurkan kredit program meskipun sebenarnya tingkat bunga tersebut jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan tingkat bunga kredit mikro (di atas 20%).



Sumber: LPS, BI, (2014), diolah

Gambar 3.  
Suku Bunga Kredit Program dan Suku Bunga LPS



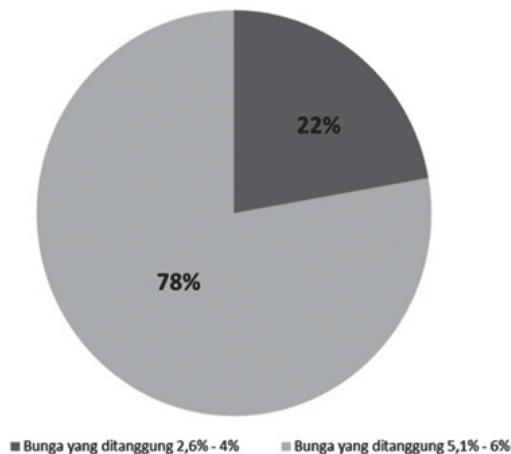
### Gambaran Bunga Bank BRI Untuk Kredit Program

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada pihak bank pelaksana yaitu Bank BRI di empat kabupaten (Lombok Tengah, Grobogan, Malang dan Gunung Kidul), tingkat bunga yang dikenakan oleh bank kepada para debitur adalah pada rentang 2,6% sampai 4% dan 5,1% sampai dengan 6%. Sedangkan tingkat bunga yang menjadi tanggungan pemerintah berada pada rentang 5.1% sampai dengan 8%. Dari 27 responden program KKP-E, sebanyak 13 orang (48%) berpendapat bahwa tingkat bunga yang dikenakan kepada mereka terlalu tinggi (5.1% - 6%). Bunga yang ideal menurut responden tersebut adalah sebesar 2.6% - 4%.

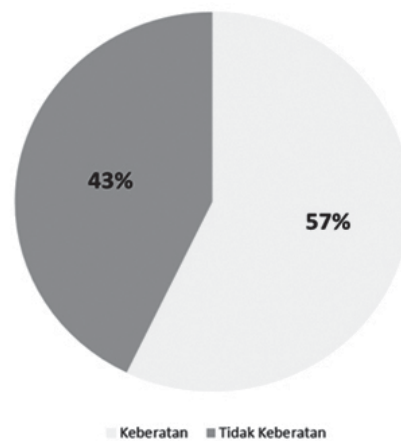
Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dan survei, pihak bank pelaksana (Bank BRI) mengusulkan bahwa tingkat bunga yang sebaiknya ditanggung oleh debitur pada rentang 4,1% sampai dengan 6%. Sedangkan tingkat bunga yang ditanggung oleh pemerintah sebaiknya berada pada rentang 6,1% sampai dengan 8%. Berdasarkan data tersebut, maka pada kondisi yang ada saat ini dan kondisi ideal yang diharapkan oleh bank pelaksana adalah proporsi tingkat bunga yang ditanggung oleh pemerintah lebih besar dari pada tingkat bunga yang ditanggung oleh debitur.

### Gambaran Bunga Bank Yang Dibayar Oleh Debitur

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada 27 debitur KKP-E di enam kabupaten (Cianjur, Gunung Kidul, Pati, Grobogan, Malang dan Lombok Tengah), tingkat bunga yang dikenakan kepada para debitur saat ini bervariasi. Untuk para debitur KKP-E, sebanyak 21 orang (78%) dari debitur dikenakan bunga sebesar 5,1% sampai dengan 6%, sedangkan sisanya memperoleh bunga yang lebih rendah yaitu pada rentang 2,6% sampai dengan 4%. Dari 27 responden tersebut, sebanyak 12 orang yang dikenakan bunga sebesar 5,1% - 6% berpendapat bahwa tingkat bunga yang dikenakan kepada mereka masih terlalu tinggi, dan mereka berharap agar tingkat bunga tersebut dapat diturunkan pada kisaran 2,5% - 4%.



Gambar 4. Besar Bunga yang Ditanggung Debitur



Gambar 5. Persepsi Debitur atas Bunga KKP-E Sebesar 5,1% - 6%

Hasil survei yang telah dilakukan belum dapat menyimpulkan apakah bunga yang ditanggung oleh debitur saat ini, yaitu pada rentang 5.1% - 6%, mencerminkan bunga yang wajar untuk dibebankan pada para debitur mengingat keterbatasan jumlah responden yang diperoleh dalam kajian ini. Namun, berdasarkan *best practices* di negara lain, dimana tingkat bunga yang ditanggung oleh debitur berada pada rentang 4% sampai dengan 8%, maka besar tingkat bunga tersebut sudah



dianggap wajar untuk dibebankan kepada para debitur kredit program. Dengan demikian, rentang tersebut dapat dijadikan acuan dalam penentuan besarnya tingkat bunga kredit program nantinya. Apabila tingkat bunga yang ditanggung oleh debitur lebih rendah dari rentang tersebut, maka hal tersebut akan mempengaruhi kemandirian dan keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh debitur karena mereka akan terbiasa dengan keringanan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya bagi debitur yang telah beberapa kali mengambil program kredit dengan subsidi bunga. Selain itu, beban fiskal pemerintah juga akan semakin besar dengan tingginya bunga yang ditanggung oleh pemerintah.

### **Tingkat Suku Bunga Kredit Program dan Beban Fiskal APBN**

Dalam rangka meminimalkan risiko fiskal pemerintah, tingkat bunga yang ditanggung oleh pemerintah dapat dikunci pada sebuah angka tertentu, sehingga beban APBN untuk subsidi bunga dapat diperkirakan dengan pasti tanpa tergantung pada fluktuasi tingkat bunga pasar. Berdasarkan data historis SBDK-BRI dari tahun 2011, subsidi tetap sebesar 6% akan memberikan tanggungan tingkat bunga 5,5% sampai dengan 6,5% seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3. Selanjutnya pada Gambar 3 telah ditunjukkan bahwa tingkat suku bunga LPS ditambah 6% telah mendekati tingkat SBDK BRI, bahkan data pada beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa tingkat bunga LPS + 6% tersebut lebih besar dari SBDK BRI, sehingga tingkat suku bunga sebesar itu juga mampu memberi insentif bagi bank pelaksana untuk menyalurkan kredit program.

Selain itu, apabila pemerintah ingin memberikan subsidi tingkat bunga tetap kepada debitur, tingkat suku bunga penjaminan LPS juga dapat dijadikan dasar tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur, sehingga nantinya tingkat bunga debitur akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi tingkat bunga penjaminan LPS. Tabel 4 menunjukkan bahwa besarnya beban tingkat bunga yang ditanggung oleh debitur pada skenario ini rata-rata lebih tinggi dengan tingkat bunga yang ditanggung debitur pada skenario subsidi tetap sebesar 6%. Namun dengan skenario tersebut, tingkat bunga yang ditanggung oleh pemerintah lebih rendah, sehingga beban fiskal pemerintah juga lebih kecil.

Tabel 3.





## Skenario Subsidi Bunga Tetap

Sumber: Berbagai sumber, data diolah(2014)

Bulan	SBDK- BRI	Beban Bunga Tanggungan Debitur		Suku Bunga LPS
		Subsidi Bunga Tetap 5%	Subsidi Bunga Tetap 6%	
Oct-11	12.49%	7.49%	6.49%	7.00%
Nov-11	12.34%	7.34%	6.34%	6.75%
Dec-11	11.75%	6.75%	5.75%	6.50%
Jan-12	11.75%	6.75%	5.75%	6.50%
Feb-12	12.09%	7.09%	6.09%	6.00%
Mar-12	11.50%	6.50%	5.50%	5.50%
Apr-12	11.50%	6.50%	5.50%	5.50%
May-12	11.50%	6.50%	5.50%	5.50%
Jun-12	11.50%	6.50%	5.50%	5.50%
Jul-12	11.50%	6.50%	5.50%	5.50%
Aug-12	11.50%	6.50%	5.50%	5.50%
Sep-12	11.50%	6.50%	5.50%	5.50%
Oct-12	11.50%	6.50%	5.50%	5.50%
Nov-12	11.50%	6.50%	5.50%	5.50%
Dec-12	11.50%	6.50%	5.50%	5.50%
Jan-13	11.50%	6.50%	5.50%	5.50%
Feb-13	11.50%	6.50%	5.50%	5.50%
Mar-13	11.50%	6.50%	5.50%	5.50%
Apr-13	11.50%	6.50%	5.50%	5.50%
May-13	11.50%	6.50%	5.50%	5.50%
Jun-13	11.52%	6.52%	5.52%	6.25%
Jul-13	11.50%	6.50%	5.50%	6.25%
Aug-13	11.50%	6.50%	5.50%	6.25%
Sep-13	11.50%	6.50%	5.50%	7.00%
Oct-13	11.75%	6.75%	5.75%	7.00%
Nov-13	11.75%	6.75%	5.75%	7.25%
Dec-13	11.75%	6.75%	5.75%	7.25%
Jan-14	11.75%	6.75%	5.75%	7.50%
Feb-14	11.75%	6.75%	5.75%	7.50%
Mar-14	11.75%	6.75%	5.75%	7.50%
Apr-14	11.75%	6.75%	5.75%	7.50%
May-14	11.75%	6.75%	5.75%	7.50%
Jun-14	11.75%	6.75%	5.75%	7.75%
Jul-14	11.75%	6.75%	5.75%	7.75%
Aug-14	11.75%	6.75%	5.75%	7.75%
Sep-14	11.75%	6.75%	5.75%	7.75%

Beberapa skenario mekanisme tersebut juga akan memberikan insentif bagi debitur untuk



senantiasa meningkatkan efisiensi dalam proses produksi yang mereka lakukan dan diharapkan nantinya para debitur dapat beralih dari pembiayaan melalui kredit program kepada pembiayaan lain tanpa subsidi bunga yang mampu menyediakan plafon kredit yang lebih tinggi.

### Analisis Potensi Dampak Terhadap APBN

Pemberian subsidi bunga tetap terhadap kredit program akan memberikan kepastian terhadap beban pemerintah yang ditanggung di dalam APBN. Di sisi lain diharapkan pemberian bunga tetap dapat memberikan edukasi bagi petani terkait fluktuasi tingkat suku bunga di pasar sehingga akan memberikan insentif bagi mereka untuk lebih efisien dalam produksi dan lebih mandiri serta tidak selamanya tergantung pada subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah.

Kebutuhan anggaran subsidi bunga kredit program KKP-E untuk APBN 2015 saat ini adalah sebesar Rp275,3 milyar seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4. Pada perhitungan tersebut, kredit pengembangan tanaman perkebunan mendapatkan subsidi yang lebih kecil (4,5%) mengingat karakteristik usaha tanaman perkebunan dalam hal risiko usaha relatif berbeda dengan karakteristik usaha tanaman lainnya. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi bunga LPS sebesar 7% dan bunga kredit program sebesar 13%, sehingga beban yang ditanggung oleh petani adalah sebesar 5,5% untuk tanaman non-perkebunan dan 7,5% untuk tanaman perkebunan. Beban yang ditanggung oleh petani pada perhitungan tidak berbeda jauh dengan beban petani yang dihitung dengan asumsi subsidi bunga tetap sebesar 6% yaitu sebesar 5,75% seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4. Perhitungan kebutuhan anggaran tersebut menggunakan asumsi suku bunga kredit sebesar 13% yang relatif lebih tinggi dari pada SBDK-BRI pada tahun 2014 yaitu sebesar 11,75%.

Penerapan subsidi bunga tetap dalam pemberian kredit program, khususnya KKP-E dapat menghemat belanja subsidi kredit program sebesar **Rp41,2 milyar** (subsidi bunga tetap 6%) hingga **Rp68,8 milyar** (subsidi bunga tetap 5%) dari alokasi anggaran subsidi kredit program sebesar Rp275,3 milyar, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5 dan Tabel 6. Simulasi tersebut didasarkan pada jumlah plafond dan pinjaman *outstanding* yang dijadikan acuan dalam perhitungan perkiraan subsidi bunga APBN 2015.

Tabel 4.  
 Kebutuhan Anggaran Subsidi Bunga pada APBN 2015

Sumber: Berbagai sumber, data diolah (2014)

No	Uraian/Skim kredit	Subsidi Bunga	Outstanding	Plafon kredit	Subsidi bunga (juta Rp)
1	Pengembangan tanaman pangan	7,50%	24,88%	2.284.940	42.637
2	Pengembangan tanaman hortikultura	7,50%	9,25%	737.530	5.117
3	Pengembangan perkebunan	4,50%	45,18%	3.384.030	68.801
4	Pengadaan pangan	7,50%	5,88%	312.980	1.380
5	Peternakan	7,50%	65,83%	2.930.962	144.709
6	Penangkapan & pembudidayaan ikan	7,50%	17,50%	967.290	12.696
<b>Total</b>					<b>275.339</b>

Tabel 5.



## Kebutuhan Anggaran Subsidi Bunga Tetap KKP-E Sebesar 6%

Sumber: Berbagai sumber, data diolah (2014)

No	Uraian/Skim kredit	Subsidi Bunga	Outstanding	Plafon kredit (juta Rp)	Subsidi bunga (juta Rp)
1	Pengembangan tanaman pangan	6%	24,88%	2.284.940	34.110
2	Pengembangan tanaman hortikultura	6%	9,25%	737.530	4.093
3	Pengembangan perkebunan	4,5%	45,18%	3.384.030	68.801
4	Pengadaan pangan	6%	5,88%	312.980	1.104
5	Peternakan	6%	65,83%	2.930.962	115.767
6	Penangkapan & pembudidayaan ikan	6%	17,50%	967.290	10.157
<b>Total</b>					<b>234.031</b>

Tabel 6.

## Kebutuhan Anggaran Subsidi Bunga Tetap KKP-E Sebesar 5%

Sumber: Berbagai sumber, data diolah (2014)

No	Uraian/Skim Kredit	Subsidi Bunga	Outstanding	Plafon Kredit (juta Rp)	Subsidi Bunga (juta Rp)
1	Pengembangan tanaman pangan	5%	25%	2.284.940	28.425
2	Pengembangan tanaman hortikultura	5%	9%	737.530	3.411
3	Pengembangan perkebunan	4,5%	45%	3.384.030	68.801
4	Pengadaan pangan	5%	6%	312.980	920
5	Peternakan	5%	66%	2.930.962	96.473
6	Penangkapan & pembudidayaan ikan	5%	18%	967.290	8.464
<b>Total</b>					<b>206.493</b>

Berdasarkan simulasi perhitungan di atas dapat diketahui bahwa, penggunaan suku bunga penjaminan LPS dan subsidi tetap suku bunga kredit program, di satu sisi dapat menghemat kebutuhan anggaran subsidi bunga yang menjadi beban bagi APBN, tergantung dari penentuan besaran subsidi suku bunganya (5% atau 6%), dan di sisi lain besaran suku bunga tersebut tidak terlalu membebani bagi para petani mengingat tidak jauh berbeda dengan suku bunga yang selama ini dibebankan pada petani berdasarkan patokan LPS+6%. Selain itu, dengan subsidi bunga tetap dan LPS sebagai dasar acuan, suku bunga kredit program masih memberikan insentif bagi bank pelaksana karena masih terdapat selisih dengan SBDK bank pelaksana, dalam hal ini adalah Bank BRI.

Mekanisme subsidi bunga tetap ini mempunyai nilai kepastian yang lebih tinggi dalam penentuan suku bunga kredit program saat terjadi fluktuasi pada suku bunga LPS, dimana hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan intensitas pembahasan antar instansi pemerintah padapembahasan dan penentuan suku bunga kredit program, sehingga dapat lebih efisien ke depannya.

**Analisis Praktik Subsidi Bunga di Beberapa Negara Lain**



Pemberian subsidi bunga dalam kredit program sektor pertanian merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi sektor pertanian. Subsidi bunga diberikan dalam rangka meningkatkan modal bagi usaha tani melalui institusi pembiayaan yang dapat menjangkau hingga ke pelosok desa. Peningkatan aksesibilitas pembiayaan bagi pelaku usaha tani akan membuat petani dapat menjalankan usaha tani dengan lebih baik karena memperoleh modal yang cukup untuk melakukan kegiatan produksinya. Petani dapat meningkatkan produksi pertaniannya dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga diharapkan petani menjadi lebih sejahtera dan dapat keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan produksi pertanian bertujuan untuk swasembada pangan, memperkuat ketahanan pangan, serta mengatasi krisis rawan pangan.

Dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian melalui pemberian subsidi bunga kepada petani dilakukan oleh beberapa negara di dunia seperti Nigeria, India, Brazil, dan beberapa negara di Eropa. Pemerintah negara-negara tersebut berusaha untuk meningkatkan produksi di sektor pertanian melalui berbagai program antara lain yaitu pemberian subsidi langsung kepada petani seperti program *US Farm Bill* oleh pemerintah Amerika Serikat, subsidi dengan sistem pemberian kupon oleh pemerintah Malawi di Afrika, dan subsidi pertanian di negara-negara Eropa yang diberikan berdasarkan luas lahan pertanian yang diusahakan petaninya.

Pemerintah India secara konsisten terus memberikan subsidi bunga dalam program pinjaman bagi petani, yaitu sejak tahun 2007 pemerintah India menetapkan suku bunga kredit untuk sektor pertaniannya. Selain itu, petani di Brazil dan Nigeria mendapatkan subsidi bunga dari pemerintahnya sehingga beban bunga efektif untuk kredit sektor pertanian di kedua negara tersebut terjangkau oleh petaninya. Beban bunga yang rendah memudahkan bagi para petani untuk dapat mengembalikan pinjaman dan menghindari kredit macet. Berdasarkan praktek yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia, subsidi bunga diberikan kepada petani pada tingkat bunga yang bervariasi antara 2% sampai dengan 6% per tahun dan disalurkan melalui institusi bank pemerintah maupun bank swasta yang dapat menjangkau petani sampai wilayah perdesaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pemberian subsidi bunga yang khusus diberikan kepada petani dalam rangka mendorong pengembangan sektor pertanian sangat penting perannya dalam memajukan sektor pertanian dan perekonomian suatu negara. Program pemberian subsidi yang tepat sasaran dan tepat jumlah akan memberi dampak yang positif bagi penerima subsidi dan juga bagi anggaran negara. Akan tetapi, usaha pemerintah untuk membantu petani melalui pemberian subsidi juga dapat memberikan dampak buruk bagi penerima subsidi, maupun bagi negara dari sisi pengeluaran dan belanja subsidi pemerintah. Hal ini karena subsidi cenderung meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu dan menjadi sulit bagi pemerintah apabila berniat untuk mengurangi atau menghapuskan subsidi karena adanya tekanan sosial dan politik sebagai dampak pencabutan subsidi.

Apabila subsidi diberikan dengan tidak tepat tentu akan membebani keuangan negara. Selain itu, pemberian subsidi yang tidak tepat akan menjadi tidak efektif dan efisien dalam penggunaannya, karena penerima subsidi akan cenderung menjadi lebih boros dalam penggunaan barang-barang yang diberikan subsidi, sebagai contoh yaitu subsidi pupuk dan BBM. Praktek pemberian bantuan subsidi di beberapa negara di dunia juga dinilai akan membuat penerima subsidi menjadi tidak mandiri dan kompetitif, sebagai contoh yaitu subsidi bunga untuk pinjaman modal. Jika diberikan tanpa pengawasan yang ketat dan sosialisasi yang benar akan membuat penerima subsidi cenderung menggunakan modal pinjaman dengan tidak tepat, terlebih lagi bila program bantuan subsidi diartikan sebagai pemberian cuma-cuma dari



pemerintah maka penggunaan modal pinjaman cenderung akan menjadi kredit macet. Penerima subsidi merasa tidak berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan selalu menjadi lebih bergantung kepada bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Pemerintah harus mengatasi permasalahan yang terkait dengan pembiayaan bagi sektor pertanian seperti masalah bunga kredit pinjaman, agunan, faktor resiko yang tinggi pada sektor pertanian, dan tingkat pengembalian yang rendah dari usaha pertanian. Faktor bunga yang tinggi bagi kredit pinjaman sektor pertanian dapat diatasi dengan pemberian subsidi bunga. Oleh karena itu praktek pemberian subsidi bunga seharusnya dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan kesulitan pembiayaan bagi para pelaku usaha di sektor pertanian.

## E. PENUTUP

### Kesimpulan

Sektor pertanian dianggap masih memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, hal ini diantaranya dibuktikan dengan pencapaian sektor ini dalam upayanya memenuhi target kebutuhan pangan nasional dan masih banyaknya penduduk Indonesia yang bekerja di sektor ini, namun masih terdapat kendala yang harus diatasi.

Diantara kendala mendasar tersebut terkait pembiayaan kredit sektor ini. Dalam membantu petani pemerintah dapat memberikan suku bunga kredit yang rendah pada petani yang memerlukan tambahan modal usaha melalui pemberian subsidi bunga kredit.

Para ahli ekonomi keuangan ternyata lebih cenderung mendukung program pemberian subsidi bunga, namun dengan meminimalisir dampak negatifnya seperti (1) subsidi akan membebani pemerintah, (2) subsidi yang diterapkan akan cenderung bersifat permanen dan sulit untuk dihapuskan, (3) dana subsidi dapat dialokasikan kepada investasi infrastruktur yang lebih menguntungkan masyarakat, (4) subsidi dapat mematikan industri pembiayaan. Praktek pemberian subsidi bunga merupakan hal yang jamak dilakukan baik di negara berkembang maupun di negara maju dengan besaran yang cukup bervariasi.

Tingkat bunga LPS dijadikan dasar acuan tingkat bunga kredit program karena merupakan salah satu unsur utama penentuan biaya dana. Beban bunga existing yang ditanggung oleh debitur (5-6%) adalah sudah wajar berdasarkan *best practices*, hasil survei dan kapasitas debitur (*bankable*). Suku bunga penjaminan LPS sudah sesuai untuk dijadikan dasar penentuan tingkat bunga kredit program, mengingat tingkat suku bunga tersebut mencerminkan biaya dana pihak ketiga yang merupakan sumber dana utama bank pelaksana.

Oleh karena itu, hal yang perlu dievaluasi dari sisi pembiayaan, terutama terkait dengan penyebab rendahnya realisasi penyerapan pembiayaan/kredit. Perlu dilakukan usulan dan langkah strategis untuk memecahkan permasalahan tersebut. Skema kredit program yang simpel dan jelas dalam aturan serta penentuan suku bunga kredit program yang tepat merupakan solusi atas masalah yang timbul, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penyerapan kredit program.

### Rekomendasi





Memperhatikan uraian di atas maka penulis memberikan beberapa catatan rekomendasi sederhana sebagai berikut:

- 1) Secara *short term*, tingkat bunga LPS bisa tetap dijadikan sebagai dasar acuan tingkat bunga kredit program karena merupakan salah satu unsur utama penentuan biaya dana dan SBDK (*prudentiality* bank penyalur tetap diperhatikan);
- 2) Penambahan besaran suku bunga harus memperhatikan kapasitas fiskal dan kemampuan petani dalam membayar (ada formulasi khusus dalam menentukan besaran tambahan bunga);
- 3) Secara *long term*, kredit program hendaknya mulai dievaluasi agar program pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian dalam pengembangan usaha atau dengan kata lain pemerintah dan pihak terkait hendaknya bisa melakukan pembinaan kpd para petani debitur sehingga mereka bisa “naik kelas” dan tidak terus mengharapkan bantuan dari pemerintah;
- 4) Untuk meminimalkan risiko fiskal, pemerintah dapat menentukan secara tetap besaran tingkat bunga yang disubsidi oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agroindonesia. (2011). *Mengarahkan Petani ke Off Farm*. Diakses pada 5 November 2014, dari <http://agroindonesia.co.id/2011/11/15/mengarahkan-petani-ke-off-farm>.
- Aziz, Abdul.(2013),*Upaya Optimalisasi Penyerapan Kredit Sektor Pertanian*, Majalah Info Risiko Fiskal, Edisi 2 Tahun 2013, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Jumlah dan %tase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi, 2010*. Diakses pada 5 Nopember 2014, dari [http://bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=23&notab=2](http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=2).
- Badiru, Idris O. (2010). *Review of Small Farmer Access to Agricultural Credit in Nigeria*. International Food Policy Research Institute Policy Note No. 25. Abuja: IFPRI Abuja.
- Bank Indonesia. (2014). *Statistik perbankan Indonesia – September 2014*. Diakses pada 27 November 2014, dari <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/indonesia/Documents/SPI%20September%202014.xls>.
- Bank Indonesia. (2014). *Suku bunga dasar kredit*. Diakses pada 27 November 2014, dari <http://www.bi.go.id/id/perbankan/suku-bunga-dasar/Documents/SBDK%20Web%20Okt2011-%20Sept%202014.xls>.
- Cardoso, Debora F, et al. (2011). *Effects of Goverment Intervention via Rural Credit Subsidy on Economic Growth and Welfare of Brazilian Regions. Working Paper No. 1*. Vicosa: Universidade Federal de Vicosa.
- Christopher, Eze C., et al. (2010). *Agricultural Financing Policies and Rural Development in Nigeria*. The 84th Annual Conference of the Agricultural Economic Society.
- Geron, Piedad S. and Magdalena S. Casuga. (2012). *Credit Subsidy in Phillipine Agriculture*. Discussion Paper Series No. 2012-28. Makati City: Phillipine Institute for Development Studies.
- Harris, Simon. (2009). *Brazilian Agricultural Subsidies*. Diakses pada 28 November 2014, dari [http://www.thehandthatfeedsus.org/AG\\_Brazilian\\_Agricultural\\_Subsidies.cfm](http://www.thehandthatfeedsus.org/AG_Brazilian_Agricultural_Subsidies.cfm).



- Hoda, Anwarul and Ashok Gulati. (2013). *India's Agricultural Trade Policy and Sustainable Development Issue Paper No. 49*. Geneva: International Center for Trade and Sustainable Development.
- Jansson, Kristina H., et al. (2013). *Agricultural Credit Market Institutions a Comparison of Selected European Countries. Working Paper No. 33*. Brussels: Center for European Policy Studies.
- Kementerian Keuangan. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.05/2007 tentang kredit ketahanan pangan dan energi*.
- Kementerian Keuangan. (2009). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang kredit usaha pembibitan sapi*.
- Kementerian Keuangan. (2009). *Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.05/2009 tentang perubahan pertama atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.05/2007 tentang kredit ketahanan pangan dan energi*.
- Kementerian Keuangan. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan nomor 198/PMK.05/2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.05/2007 tentang kredit ketahanan pangan dan energi*.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2009). Laporan tahunan Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2009.
- \_\_\_\_\_ (2010). Laporan tahunan Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2010.
- \_\_\_\_\_ (2011). Laporan tahunan Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2011.
- \_\_\_\_\_ (2012). Laporan tahunan Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2012.
- \_\_\_\_\_ (2013). Laporan tahunan Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2013.
- Meyer, Richard L. (2011). *Subsidies As an Instrument in Agriculture Finance: a Review*. Joint Discussion Paper. Washington, DC: World Bank.
- Morduch, Jonathan. (2000). *The Microfinance Schism*. World Development, 28(4), 617-629.
- Reserve Bank of India. (2013). *Union Budget- 2013-14 Interest Subvention Scheme*. Diakses pada 27 November 2014, dari <http://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=8617&Mode=0>.
- Swinnen, Johan F. and Hamish R. Gow. (1997). *Agricultural Credit Problems and Policies During the Transition to a Market Economy in Central dan Eastern Europe*. Policy Research Group Working Paper No. 6. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
- Wiggins, Steve. and Jonathan Brooks. (2010). *The Use of Input Subsidies in Developing Countries*. Global Forum on Agriculture.